

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi ini segala sesuatu berjalan dan berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan zaman yang tidak dapat dihindari, terjadi karena tingkat teknologi yang semakin canggih. Hal itu menuntut perusahaan untuk dapat bersaing dengan sehat. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan situasi ekonomi yang tidak stabil, maka suatu perusahaan harus memiliki keunggulan yang kompetitif agar tetap dapat bertahan. Karena apabila suatu perusahaan tidak memiliki keunggulan, maka cepat atau lambat akan mengalami kemunduran atau kebangkrutan. Selain itu, manajemen pada suatu perusahaan harus dapat menjaga dan meningkatkan mutu produk yang dihasilkan perusahaan.

Agar perusahaan dapat bertahan dalam persaingan yang ketat dalam dunia usaha ini, dan untuk mengantisipasi adanya kekeliruan internal, maka perusahaan perlu memiliki strategi yang tepat. Strategi tersebut diperlukan untuk mengarahkan kegiatan perusahaan dalam menentukan sistem yang baik di perusahaan itu sendiri. Namun selain dengan memiliki sistem dan strategi yang tepat, perusahaan juga perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang baik.

Namun, dalam menjalankan usahanya setiap perusahaan tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah usahanya mempertahankan diri dalam persaingan yang ketat ini. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat berasal dari luar maupun dari dalam perusahaan seperti tekanan maupun ancaman.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ini, perusahaan haruslah mempunyai dasar yang kuat dalam perusahaan seperti komitmen, setidaknya komitmen dapat mempertahankan adanya perusahaan.

Pada akhirnya perusahaan haruslah dapat mempertanggungjawabkan atas aktivitas-aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan untuk menilai keberhasilan perusahaan dari segi keuangan perusahaan tersebut. Prinsip-prinsip akuntansi tidak luput dari penyajian laporan keuangan, salah satunya yaitu mengenai transparansi.

Penerapan transparansi di organisasi diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal (managemen) dan pihak eksternal (masyarakat). Silver (2005) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut organisasi untuk lebih transparan. Selanjutnya, Silver (2005) mendefinisikan transparansi sebagai suatu kejujuran dan ketepatan yang tidak hanya dalam jumlah yang disampaikan atau dirilis oleh organisasi, tapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya.

Dalam mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu Organisasi yang transparan dan keterlibatan pemegang kepentingan (*stakeholders*) (Hess, 2007). Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan, seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, earnings, current cost, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup. Masyarakat

memiliki hak dasar untuk tahu dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan (Stiglitz,1999) serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya (Silver, 2005).

Salah satu fenomena mengenai transparansi tergambar pada kasus Badan pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masih banyak permasalahan pada pengelolaan keuangan Kota Bandung. BPK juga menemukan masih banyak permasalahannya pada penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Bandung. Disamping itu, pemerintah Kota Bandung juga belum mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada publik. Dalam pemeriksaan tersebut, Laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung memiliki opini WTP dan WDP dalam 3 tahun terakhir.

Masalah pertama adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum sesuai dengan ketentuan. Masalah kedua, para bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu setiap Pemkab/PemKot, tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Temuan ketiga terkait aset tetap. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai, penatausahaan aset tetap belum tertib, penyajiannya belum didukung daftar rincian, belum ada penomoran atau kodefikasi (Pikiran Rakyat, 20 Mei 2012)

Fenomena mengenai transparansi juga tergambar pada Koordinator Sekretariat Koalisi Responsi Bank Indonesia Akbar Ali mengatakan, masih

banyak ditemukan masalah serius pada transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan. Khususnya sektor perbankan yang berperan dalam menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan investasi publik serta penyaluran kredit.

Pernyataan tersebut, tercermin dari Laporan Riset Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Keuangan yang dilakukan oleh jaringan Fair Finance Guide International. Berdasarkan temuan tercatat dari 48 bank yang dinilai di tujuh negara, lebih dari separuh masih mendapatkan skor rendah (4 dalam skala 10). "Hal itu menunjukkan bahwa bank masih belum serius dalam upaya mereka menjadi transparan dan akuntabel," ujar Akbar dalam Launching Riset Transparansi dan Akuntabilitas Perbankan Studi Kasus Indonesia di Chese Cake Factory, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Sementara itu, Akbar menyebutkan, masih terdapat empat persoalan krusial yang masih sering ditemukan melalui studi kasus yang dilakukan di Indonesia. Pertama, minimnya keterbukaan informasi bank mengenai nasabah dan simpanan mereka terkait isu pajak dan korupsi dengan berlindung pada prinsip kerahasiaan bank. Kedua, bank tidak transparan mengenai suku bunga, terutama suku bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) yang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Sedangkan, ketiga, rendahnya tingkat kepatuhan bank dalam memublikasikan Laporan Berkelanjutan. "Kemudian, yang keempat bank kurang terbuka mengenai kebijakan manajemen risiko lingkungan dan sosial," papar dia.

Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah harus harus mendorong terwujudnya pengelolaan bank yang transparan di Indonesia. Melalui penerapan keterbukaan informasi bank untuk kasus pajak dan korupsi, transparansi suku

bunga kredit. "Publikasi laporan berkelanjutan secara berkala,serta transparansi kebijakan manajemen resiko lingkungan dan sosial," pungkasnya. (<http://responsibank.id/berita/2015/48-bank-di-tujuh-negara-dapat-rapor-merah-transparansi/>).

Kekuatan koersif adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem (Ashworth, 2009). Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Di sisi lain, kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi (*legitimate coercion*) (scott, 1987), sehingga hanya menekankan aspek-aspek positif (Hess, 2007) agar organisasi terlihat baik oleh pihak-pihak di luar organisasi. Perubahan organisasi yang didasari kekuatan koersif akan menyebabkan organisasi lebih mempertimbangkan pengaruh politik dari pada teknis (Ashworth, 2009). Perubahan organisasi yang lebih dipengaruhi politik akan mengakibatkan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi, khususnya terkait penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Salah satu contoh kasus tekanan eksternal yaitu pada perusahaan media televisi. Televisi hadir sebagai alat sosial, politik, budaya, bahkan sebagai sebuah industri informasi corporate. Sebagai industri televisi menjanjikan keuntungan cukup besar bagi pemiliknya bersaing secara kompetitif. Misalnya kuartal 3, tahun 2006 Group Media Nusantara Citra (MNC) dapat meraup keuntungan Rp 4,8 triliun (32% dari total belanja iklan TV). Kemudian Trans TV, dan Trans 7 mampu mengumpulkan keuntungan sebesar rp. 3,4 triliun (23,2%) ANTV dan

Lativi (ketika itu) memperoleh pendapatan, Rp 3,2 triliun (15%) dari total belanja iklan televisi (AGB Nielsen Media Research, 2006)

Hal tersebut mengakibatkan industri televisi komersial tidak lagi berorientasi untuk memenuhi hak masyarakat agar terpenuhinya kebutuhan informasi dan hiburan, tetapi lebih dominan berorientasi pada keuntungan ekonomi kapitalis, kekuatan pasar secara kompetitif. Konsentrasi kepemilikan media televisi komersial yang terjadi saat ini dikhawatirkan berdampak negative bukan hanya pada sistem tata kelola media di Indonesia, tetapi juga pada konten yang ditransformasikan kepada masyarakat sebagai khalayak pemirsanya.(Arifianto_peneliti komunikasi dan budaya media)

Ketidakpastian mengakibatkan organisasi merubah proses dan strukturnya (Govindarajan, 1984). Perubahan organisasi baik proses maupun struktur yang ada pada organisasi sebagai respon terhadap ketidakpastian lingkungan tidaklah mudah. Ketidaksiapan organisasi terhadap suatu standar berupa peraturan akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam bertransformasi ke peraturan yang baru, yang demikian juga akan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dalam situasi yang tidak pasti, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa respon terbaik yang dapat dilakukan organisasi adalah dengan meniru organisasi yang mereka anggap berhasil (Mizruchi dan Fein, 1999).

Fenomena mengenai ketidakpastian lingkungan tergambar dari sejumlah emiten tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia merasakan dampak negatif penurunan harga komoditas selama semester I/2012 akibat berkurangnya

permintaan ekspor. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan ekspor batubara turun 19% menjadi 137 juta ton pada semester pertama tahun ini. Angka tersebut setara dengan 74,4% dari produksi batu bara nasional yang mencapai 184 juta ton.

Penurunan laba disebabkan kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 7% dan jumlah persediaan batubara yang membengkak hingga 8 kali lipat. Penurunan laba bersih juga dialami oleh PT Pertambangan Batubara Bukit Asam Tbk akibat penumpukan pasokan dan harga komoditas yang lebih rendah. Fajar Indra, analis PT Panin Sekuritas Tbk, mengatakan faktor utama yang menyebabkan kinerja kurang memuaskan dari perusahaan batubara adalah permintaan global yang dipicu oleh krisis Eropa dan perlambatan ekonomi China. "Karena demand (permintaan) berkurang, stok melimpah, maka harga turun," ujarnya. (<http://market.bisnis.com/read/20120807/190/90012/kinerja-emiten-sektor-tambang-merosot-karena-harga-anjlok>)

Menurut Nadirsyah (2008) dalam Silvia (2013), komitmen organisasi adalah suatu keyakinan dan dukungan yang kuat dari manajemen untuk melakukan, menjalankan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang ditetapkan secara bersama sehingga tujuan atas diterapkannya kebijakan tersebut dapat dicapai. Keberadaan komitmen manajemen yang kuat sangat dibutuhkan organisasi agar dapat meningkatkan kinerja, salah satunya dalam penerapan transparansi.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan komitmen setiap anggota dalam sebuah organisasi. Tingkat komitmen, baik komitmen dari perusahaan terhadap karyawan maupun antara karyawan terhadap perusahaan

sangat diperlukan karena melalui komitmen yang telah ditetapkan akan tercipta iklim kerja yang profesional. Komitmen organisasi merupakan “perspektif yang bersifat keperilakuan dimana komitmen diartikan sebagai perilaku yang konsisten dengan aktivitas (*consistent lines of activity*)” (Ivan Aris dan Imam Ghozali, 2006:193). Sehingga semakin tinggi kinerja yang akan dihasilkan, yang menuju pada tingkat penilaian yang semakin tinggi.

Permasalahan lain yang dapat dilihat bahwa pergantian atasan pada sebuah bagian/departemen memberikan pengaruh pada komitmen dari staff/anggota. Ketika atasan yang pertama memiliki kemampuan yang bagus dalam mendorong serta memberikan motivasi pada anggota/staffnya maka timbul semangat kerja serta komitmen yang tinggi. Tetapi ketika ada pergantian pimpinan, yang terjadi adalah komitmen dari staff atau anggota tersebut terjadi penurunan, sehingga tidak mencapai target.

Menurut Model Meyer and Allen (1991) Komitmen organisasional merupakan perasaan akan kewajiban karyawan untuk berada pada organisasional. Perasaan tersebut dihasilkan dari internalisasi tekanan normatif individu pada saat masuk organisasional. Sedangkan menurut Sopiah (2008) komitmen organisasional merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasinya merupakan suatu modal dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi organisasi.

Komitmen karyawan yang diberikan kepada organisasi juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah internal organisasi seperti berkurangnya

biaya kegiatan operasional dan konflik dalam organisasi. Komitmen yang kuat memungkinkan setiap karyawan untuk berusaha menghadapi tantangan dan tekanan yang ada. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan tersebut akan menumbuhkan rasa kebanggaan tersendiri terhadap organisasinya. (Toegijono: 2007)

Tingkat komitmen organisasional yang dimiliki karyawan dapat mendorong keberhasilan suatu pencapaian dalam perusahaan. Komitmen organisasional adalah faktor utama dan sangat penting, karena inti dari komitmen organisasional adalah keterikatan dan loyalitas seorang karyawan kepada perusahaan yang akan mendorong mereka untuk selalu bekerja dalam berbagai situasi di perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Johannes Sihaloho (2013) dengan judul “PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN” : studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dengan sampel yang ditentukan sebanyak 42 orang. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada subjek penelitian yaitu pada Bank Syariah di Kantor Cabang Kota Bandung. Selain daripada itu dimensi yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan dimensi faktor pendukung tekanan eksternal (X1), faktor ketidakpastian lingkungan (X2), jenis komitmen organisasi (X3), dan indikator dari transparansi (Y).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **”PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN”** (Survei Pada Bank Syariah di Kantor Cabang Kota Bandung).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tekanan eksternal pada Bank Syariah di Kantor Cabang Kota Bandung
2. Bagaimana ketidakpastian lingkungan pada Bank Syariah di Kantor Cabang Kota Bandung
3. Bagaimana komitmen organisasi pada Bank Syariah di Kantor Cabang Kota Bandung
4. Bagaimana transparansi pelaporan keuangan pada Bank Syariah di Kantor Cabang Kota Bandung
5. Seberapa besar pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen organisasi terhadap transparansi pelaporan keuangan pada Bank Syariah di Kantor Cabang Kota Bandung secara parsial.

6. Seberapa besar tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen organisasi terhadap transparansi pelaporan keuangan pada Bank Syariah di Kantor Cabang Kota Bandung secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tekanan eksternal yang terdapat pada Bank Syariah di Kantor Cabang Kota Bandung.
2. Mengetahui ketidakpastian lingkungan yang terdapat pada Bank Syariah di Kantor Cabang Kota Bandung.
3. Mengetahui komitmen organisasi yang terdapat pada Bank Syariah di Kantor Cabang Kota Bandung
4. Mengetahui penerapan transparansi pelaporan keuangan yang terdapat pada Bank Syariah di Kantor Cabang Kota Bandung.
5. Mengetahui seberapa besar pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi terhadap transparansi pelaporan keuangan yang terdapat pada Bank Syariah di Kantor Cabang Kota Bandung secara parsial.
6. Mengetahui seberapa besar pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi terhadap transparansi pelaporan keuangan yang terdapat pada Bank Syariah di Kantor Cabang Kota Bandung secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen organisasi terhadap transparansi pelaporan keuangan berdasarkan tujuan, terlebih terlebih pengembangan ilmu akuntansi umumnya, dan akuntansi manajemen pada khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan keadaan yang di lapangan, serta ,menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam mengetahui sejauh mana penerapan transparansi pelaporan keuangan dalam perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan cara-cara terbaik dalam mengetahui pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis, instansi dan pengembangan umum Akuntansi.

1.5 Lokasi dan Waktu

Dalam rangka penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Cabang Bank Syariah di Kota Bandung. Penulis melakukan penelitian ini mulai dari Februari 2015 sampai dengan selesai.